



BBM NAIK DADAKAN, APA KABAR DAYA BELI?

Kenaikan mendadak harga BBM nonsubsidi memicu sorotan publik. Mulai Rabu (10/6) dini hari, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar 32 persen. Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara Peralite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Kebijakan ini disebut mengejutkan. Bahkan DPR mengaku tidak mendapat informasi sebelumnya. Di sisi lain, YLKI mengkritik proses penetapan harga yang dinilai kurang transparan dan minim sosialisasi kepada masyarakat. Para ekonom mengingatkan dampaknya tidak hanya dirasakan kelompok atas, tetapi juga kelas menengah yang menjadi pengguna utama Pertamax. Kenaikan BBM berpotensi menekan daya beli akibat lonjakan biaya transportasi, logistik dan harga barang. Di sisi lain, pemerintah dan Dewan Energi Nasional bersikukuh perubahan harga diperlukan untuk mengurangi beban fiskal serta menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan perkembangan harga minyak dunia. Langkah ini tentunya menjamin keamanan dompet negara, tapi di sisi lain menjadi alarm daya beli rakyat. Mampukah? BACA HAL 11...

Pertamina
HARGA BBM
Rabu, 10 Juni 2026:

-  Peralite
RP 10.000 /LITER

-  Biosolar:
Rp 6.800 /LITER

-  Pertamax
Rp 16.250 /LITER

-  Pertamax
Rp 16.250 /LITER

-  Pertamax Green 95
Rp 17.000 /LITER

-  Pertamax Turbo
Rp 20.750 /LITER

-  Dexlite
Rp 23.000 /LITER

-  Pertamina Dex
Rp 24.800 /LITER

BANYAK DOSA HINGGA ANCAMAN PIDANA, PESAN KERAS PRESIDEN KE PENGUSAHA

Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada kalangan pengusaha nasional agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum dan praktik-praktik yang merugikan negara. Di hadapan ratusan peserta Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu, (10/6), Prabowo menegaskan bahwa era pengawasan yang lemah telah berakhir.

Dengan gaya bicara yang santai namun tegas, Prabowo mengaku memahami berbagai dinamika yang selama ini terjadi di dunia usaha nasional. Ia bahkan melontarkan sindiran yang langsung disambut tawa peserta.

"Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lu enggak bisa bohong sama gue, gue udah ngerti lo," kata Prabowo.

Namun, Presiden mengatakan masa lalu tidak perlu terus



Presiden Prabowo membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, (10/6).ist.

memanfaatkan celah hukum untuk memperoleh keuntungan. Menurut dia, pemerintah memiliki instrumen yang semakin kuat untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya nasionalisme di kalangan pengusaha. Ia menyebut pelaku usaha memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional.

Karena itu, Presiden meminta para pengusaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Kekayaan yang diperoleh dari Indonesia, menurut dia, harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Pengusaha harus jadi patriotik. Saudara memupuk kekayaan sekarang dan saya kira semua ajaran agama atau filosofi mengajarkan agar semua kekayaan yang kau dapatkan dengan baik agar digunakan untuk tujuan baik. Sebaiknya digunakan untuk membantu orang kurang mampu, baru Indonesia akan bangkit," kata Prabowo.

Ia mengingatkan bahwa masa depan bangsa akan sulit berkembang apabila para pemilik modal lebih memilih membawa kekayaannya ke luar negeri tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

"Kalau saudara kaya raya habis itu kekayaannya kau bawa lari di luar negeri dan kau tidak peduli dengan rakyat sekitarmu, ya masa depan bangsa kita tidak akan baik," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya tidak anti terhadap dunia usaha maupun investor asing. Sebaliknya, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum dan penegakan aturan yang konsisten.

Menurut dia, dunia usaha tidak akan berkembang dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Oleh sebab itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar tercipta keadilan dan kepastian bagi seluruh pelaku ekonomi.

"Pemerintah harus membuat keadaan baik untuk pengusaha. Keadaan baik itu antara lain hukum harus ditegakkan. Kalau tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar, hukum berdasarkan kekuatan dan di ujungnya tidak baik bagi kita semua," katanya.(wid,ist/dya)

dipersoalkan. Yang terpenting, menurut dia, para pelaku usaha meninggalkan praktik-praktik yang melanggar hukum dan fokus membangun perekonomian nasional.

"Tapi sudahlah ya enggak apa-apa. Dosa kita tutup. Kita bangkit ke depan. Sekarang jangan coba-coba melanggar hukum, saudara akan kalah," ujarnya.

Prabowo menilai perkembangan

teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), membuat ruang gerak pelanggaran hukum semakin sempit. Aparat penegak hukum, kata dia, kini dapat menelusuri berbagai dokumen dan kontrak bisnis yang sebelumnya sulit diperiksa dalam waktu singkat.

Karena itu, ia mengingatkan para pengusaha agar tidak lagi mencoba

Disorot Sering ke Luar Negeri, Prabowo Senggol Jokowi

Jokowi tidak peduli politik luar negeri," kata Prabowo. Ia kemudian membandingkannya dengan kritik yang kini diarahkan kepadanya. "Saya sering ke luar negeri, Prabowo sering ke luar negeri, aneh," ujarnya.

Prabowo mengatakan dinamika geopolitik global saat ini berubah sangat cepat sehingga Indonesia perlu menjaga komunikasi dengan seluruh kekuatan besar dunia. Menurut dia, situasi internasional semakin tidak menentu sehingga pemerintah harus membangun hubungan baik dengan berbagai negara tanpa memandang blok politik tertentu.

Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan Indonesia saat ini dipandang positif oleh banyak negara karena konsisten menjalankan politik luar negeri yang tidak memusuhi pihak mana pun. Ia menilai posisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, hingga ketahanan nasional.

Prabowo lalu menjelaskan alasan dirinya kerap memenuhi undangan para pemimpin negara besar. Ia mencontohkan apabila Presiden Amerika Serikat mengundangnya, maka sebagai kepala negara ia harus hadir demi menjaga kepentingan nasional. "Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia ini nggak hadir, ha... coba aja," katanya.

Menurut Prabowo, prinsip yang sama juga berlaku ketika undangan datang dari negara besar lainnya. Ia menyebut Indonesia tidak bisa hanya hadir di satu pusat kekuatan dunia dan mengabaikan yang lain. "Sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Gue nongol di Washington, gue nggak nongol di Moskow? Nggak bisa, Saudara-saudara," ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa dirinya juga memenuhi undangan Presiden Tiongkok, India, hingga Brasil sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan dengan seluruh mitra strategis Indonesia. (Wid,ist/dya)

BEBERAPA JEJAK LAWATAN LUAR NEGERI PRABOWO (OKT 2024 - JUN 2026)

Total Lawatan

- Sekitar 49-54 kali kunjungan luar negeri
- Sekitar 28-29 negara tujuan
- Sekitar 95-134 hari berada di luar negeri

Negara yang Paling Sering Dikunjungi

- Malaysia — 5 kali
- Prancis — 4 kali
- Uni Emirat Arab — 4 kali

Kunjungan Tahun 2026

Prancis

Januari 2026, April 2026, Mei 2026

Agenda:

- Kerja sama pertahanan
- Ketahanan pangan
- Negosiasi IEU-CEPA

Fokus ASEAN (Malaysia)

- Lawatan berulang
- Penguatan stabilitas geopolitik ASEAN



PRESIDEN Prabowo Subianto menanggapi kritik yang menyoroti intensitas kunjungan luar negerinya. Prabowo menilai kritik tersebut tidak konsisten. Menurut dia, ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai jarang melakukan kunjungan luar negeri, hal itu juga menjadi bahan kritik.

"Ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan. Jokowi nggak pernah ke luar negeri,

ANGGARAN KEMENHAM DISOROT DPR, HANYA 5 PERSEN SENTUH KORBAN HAM

Pembahasan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) di Komisi XIII DPR RI berlangsung panas. Selain mendapat kritik dari Fraksi PDI Perjuangan karena dinilai lebih banyak membiayai birokrasi ketimbang perlindungan korban pelanggaran HAM, usulan anggaran yang diajukan Menteri HAM juga belum mendapat persetujuan dari Komisi XIII DPR.

Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6), anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti pagu anggaran KemenHAM yang hanya mencapai Rp728,1 miliar dari total usulan Rp3,982 triliun.

"Namun kami menilai bahwa pada akhirnya seperti disampaikan saudara Menteri persoalan bukan hanya



besaran pagu yang diterima tetapi gimana anggaran tersebut diprioritaskan," kata Rieke.

Menurut Rieke, dari total pagu Rp728,1 miliar tersebut, sekitar 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan program pemajuan dan penegakan HAM hanya memperoleh 34,1 persen.

Ia merinci bahwa dari anggaran

dukungan manajemen, sekitar Rp343,2 miliar digunakan untuk kebutuhan internal organisasi. Dari jumlah itu, Rp114,1 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional kantor.

"Lebih jauh fraksi PDIP melihat bahwa anggaran dukungan manajemen tersebut sekitar Rp343,2 miliar digunakan untuk belanja

pegawai sebesar Rp114,1 miliar untuk operasi kantor artinya lebih dari 95% anggaran dukungan manajemen terserap untuk kebutuhan internal organisasi," ujarnya.

Rieke juga menilai program pemajuan dan penegakan HAM saat ini masih didominasi kegiatan sosialisasi, pelatihan, penguatan kapasitas, penyusunan regulasi, monitoring, penilaian, hingga koordinasi. Sementara anggaran yang berpotensi langsung menyentuh korban pelanggaran HAM, pengaduan masyarakat, perlindungan warga negara, dan pemulihan HAM hanya sekitar Rp50 miliar.

"Dengan demikian, dari keseluruhan pagu KemenHAM sebesar Rp728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan HAM hanya sekitar 5-6% saja," tegasnya.

Karena itu, Rieke menilai orientasi penggunaan anggaran masih perlu diperbaiki. "Kami berpandangan negara tidak boleh lebih banyak membiayai birokrasi daripada hadirkan perlindungan nyata bagi warga negara yang HAM-nya dilanggar," imbuhnya.

Sorotan serupa juga datang dari pimpinan Komisi XIII DPR. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyatakan pihaknya belum dapat menerima usulan anggaran yang disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai dan meminta Kementerian melakukan perbaikan serta penyusunan ulang anggaran secara lebih rinci.

"Jadi Ibu Bapak semua, dengan segala hormat, kita rapat berikutnya, kita tak ada kesimpulan hari ini, kita terima Kemenham setelah perbaikan anggarannya. Gitu ya," kata Willy.

Menurut Willy, usulan anggaran yang diajukan masih belum menunjukkan arah program yang jelas dan terukur. Ia menilai rancangan anggaran yang diajukan cenderung bersifat gelondongan.

"Jadi kami belum bisa beri persetujuan dan kita pending rapat ini, karena ini lebih besar pasak daripada tiang, kemudian harus ada clear order. Apa sih tadi, ini kan bukan Kementerian teknis, jadi mereka tidak beri direct services, tapi services seperti apa yang harus clear," ujarnya.

Willy menegaskan bahwa setiap program harus memiliki ukuran yang jelas sehingga dapat dievaluasi efektivitasnya. (tin,ist,kum/dya)

DINAMIKA ANGGARAN KEMENTERIAN HAM

○ Akhir 2024

Pagu awal hanya sekitar Rp64-113 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan Rp20 triliun untuk lebih dari 200 program, namun dikritik DPR karena dinilai tidak realistis.

○ Tahun 2026

Anggaran ditetapkan Rp718 miliar. Pigai mengeluhkan keterbatasan dana operasional dan mengaku beberapa kali menggunakan dana pribadi.

○ Usulan 2027 (Juni 2026)

Kementerian HAM mengajukan anggaran Rp3,982 triliun, tetapi ditolak DPR. Kementerian diminta menyusun ulang program dengan fokus pada pelayanan masyarakat dan target jangkaun 5 tahun ke depan.



MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluhkan minimnya apresiasi terhadap kinerja Kementerian HAM saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Keluhan itu disampaikan Pigai setelah mendapat kritik dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, terkait usulan anggaran kementeriannya yang dinilai lebih banyak berorientasi pada kebutuhan internal dibanding pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Willy

Pigai Mengeluh Tak Diapresiasi, Klaim Bisa Pecahkan Rekor Dunia

menegaskan DPR sebenarnya mendukung penguatan Kementerian HAM, termasuk kemungkinan penambahan anggaran. Namun, ia meminta agar skema penggunaan anggaran dibenahi terlebih dahulu agar lebih jelas arah dan manfaatnya.

"Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita dukung semua. Bahkan anggaran kami bilang tadi kami bilang 'ini kurang', kita ingin tambah triliunan tapi apa tadi kenapa bisa begini? Kami ini dukung, gak mungkin, kita sama sama pejuang HAM, tapi skemanya ini tolong dibenahi," kata Willy.

Menanggapi kritik tersebut, Pigai mengaku merasa kementerian yang dipimpinnya telah mencatat berbagai capaian, tetapi belum mendapatkan penghargaan yang layak dari DPR.

"Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi," ujar Pigai.

Pernyataan itu langsung ditanggapi Willy yang menegaskan

bahwa Komisi XIII sejatinya sedang memberikan apresiasi sekaligus masukan agar program kementerian lebih terarah.

"Ini kita apresiasi, kakak tenang aja," jawab Willy. Meski demikian, Willy kembali menekankan pentingnya perbaikan rancangan anggaran. Ia meminta Kementerian HAM menyusun peta jalan yang jelas, termasuk target jangka menengah hingga lima tahun ke depan.

"Baik ibu-bapak semua, kita tunggu perbaikan ini, kemudian kita minta skema trajectory-nya minimal 5 tahun seperti apa, sehingga ketahuannya di mana, pembangunan instrumennya gimana, SDM-nya seperti apa," ujarnya. Dalam rapat yang sama, Pigai juga memaparkan sejumlah capaian yang menurutnya menjadi bukti kinerja Kementerian HAM. Salah satunya adalah program pendidikan HAM yang disebut berpotensi mengantarkan Indonesia mencatat rekor dunia. (tin,ist/dya)

RAMAI-RAMAI BANTAH PUNYA DAPUR MBG, PEJABAT HINGGA PIMPINAN KPK TERSERET

Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga memunculkan daftar nama tokoh dan pejabat yang disebut-sebut terkait dengan pengelolaan maupun penitipan titik dapur MBG. Namun, satu per satu nama yang beredar di media sosial kini ramai-ramai membantah keterlibatan mereka.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjadi salah satu pihak yang secara terbuka membantah tuduhan tersebut. Dudung mengaku memang pernah memperkenalkan sejumlah pengurus pesantren kepada Kepala BGN Dadan Hindayana karena pesantren tersebut memiliki ribuan santri yang berpotensi menjadi penerima manfaat program MBG. Namun, setelah itu dirinya tidak lagi mengikuti proses administrasi maupun pembangunan dapur.

Menurut Dudung, hingga kini dapur yang diajukan pihak pesantren tersebut bahkan belum selesai dibangun. Karena itu, ia menegaskan isu yang menyebut dirinya memiliki dapur MBG sama sekali tidak benar.

"Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek. Saya kasih hadiah nanti," kata Dudung Rabu (10/6).

Dudung menilai tuduhan tersebut muncul karena dirinya yang mempertemukan pengurus pesantren



dengan Kepala BGN sehingga muncul kesan seolah-olah memiliki kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. Padahal, menurut dia, perannya hanya sebatas memperkenalkan.

Bantahan serupa datang dari Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. Namanya ikut tercantum dalam daftar puluhan tokoh yang viral di

media sosial dan dikaitkan dengan dugaan penitipan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Musyafak mengaku tidak mengetahui sama sekali mekanisme maupun tata kelola program MBG karena seluruh kebijakan berada di tingkat pemerintah pusat.

"Masalah MBG itu, gak tahu sama

Capaian MBG

Data Kementerian Keuangan, 5 Juni 2026

Penerima manfaat

63,13 juta

Jumlah SPPG

29.679

Realisasi Anggaran

Data Kementerian Keuangan, 5 Juni 2026

Total realisasi

Rp88,15 T

Persentase:

26,3%

dari total anggaran 2026 (Rp268 triliun)

26 Nama Pejabat Mencuat, Disebut Didominasi Kalangan Legislatif

KASUS dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan babak baru. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, yang kini berstatus tersangka, disebut telah menyampaikan daftar lebih dari 20 nama tokoh dan pejabat kepada penyidik Kejaksaan Agung. Menariknya, mayoritas nama yang disebut berasal dari kalangan legislatif.

Informasi tersebut disampaikan kuasa hukum Sony Sanjaya, Krisna Mukti. Ia mengungkapkan bahwa daftar nama yang telah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mencakup tokoh dari berbagai lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Namun, menurutnya, kelompok legislatif menjadi pihak yang paling dominan dalam daftar tersebut.

"Persentasenya mungkin terbesar legislatif," kata Krisna Mukti, Rabu (10/6/2026). Krisna menegaskan kliennya tidak sedang melakukan tuduhan tanpa dasar. Menurut dia, Sony memiliki sejumlah bukti yang

saat ini telah diamankan penyidik Kejaksaan Agung, termasuk telepon genggam yang berisi percakapan dengan sejumlah pihak yang diduga memintajatah titikdapur MBG.

"Jadi semua bukti-bukti itu ada di dalam, semua bukti chat itu ada di dalam HP yang saat ini disita oleh penyidik. Jadi semua bukti itu ada di dalam HP klien saya dan itu harus dibuka," ujarnya.

Ia juga mengklaim daftar nama tersebut dapat diungkap ke publik tanpa harus menunggu proses persidangan. Menurutnya, Sony siap menjelaskan siapa saja pihak yang disebut, kapasitas jabatannya, serta bentuk pengaruh yang diduga digunakan terkait permintaan titikdapur MBG.

Sebelumnya, beredar daftar sekitar 20 hingga 26 nama tokoh dan pejabat yang diduga meminta titik dapur MBG kepada Sony Sanjaya maupun mantan pimpinan BGN lainnya. Selain anggota legislatif, daftar tersebut disebut memuat kerabat pejabat Kabinet Merah Putih, aparat penegak hukum, hingga pengurus

partai politik.

Meski demikian, Krisna enggan memastikan keabsahan daftar yang beredar di media sosial. "Saya tak bisa bilang itu benar atau tidak," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta publik menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Menurutnya, seluruh informasi terkait 26 nama tersebut masih harus diverifikasi dan diklasifikasikan oleh penyidik.

"Ya pertama tentunya kita ikuti saja proses hukum yang berjalan dengan baik. Pada hari ini kan bolanya sudah ada di Kejaksaan," kata Qodari.

Qodari menjelaskan Kejaksaan Agung saat ini tengah mendalami dua kelompok besar dugaan penyimpangan dalam kasus MBG, yakni pengadaan barang dengan harga yang tidak sesuai dan dugaan praktik jual beli titik dapur. Karena itu, setiap nama yang muncul masih harus diuji keterkaitannya dengan konstruksi perkara. (wid,ist/dya)

sekali sehingga tidak mau komentar. Kan itu kewenangan di pusat. Tata kelola dan mekanismenya seperti apa, kami tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah diajak rembukan terkait dengan MBG itu," kata Musyafak saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur.

Politikus PKB itu menegaskan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam pengelolaan maupun pembagian titik layanan MBG. Ia bahkan menantang pihak yang menuduhnya untuk menunjukkan bukti.

"Cari satu aja kalau ada tak kasih hadiah. Saya enggak ada sama sekali, gak punya MBG," tegasnya.

Selain Dudung dan Musyafak, nama Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga ikut terseret dalam daftar yang beredar. Nama Fitroh disebut-sebut muncul dalam informasi yang berhubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN periode 2025-2026 Sony Sanjaya yang kini berstatus tersangka dan mengajukan diri sebagai justice collaborator. (wid ist/dya)

OTT BUPATI MUARA ENIM

Kronologi

- **8 Juni 2026:** KPK OTT di Jakarta dan Sumsel.
- **10 orang diamankan:** 5 pejabat Pemkab Muara Enim dan 5 pihak swasta.
- **9 Juni 2026:** Bupati Edison ditetapkan tersangka dan ditahan.

Modus

- Diduga menerima fee proyek 5% dari kontraktor.
- Terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya.
- Dana disalurkan lewat rekening pegawai, staf, hingga OB yang kemudian ditutup.

Barang Bukti

- **Rp2 miliar** uang tunai (Rupiah, Dolar, dan Riyal).
- **Rp1,47 miliar** saldo rekening disita KPK.



Skandal Suap Muara Enim OTT KPK MEREMBET KE BPK, 5 ASN DICIDUK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lima ASN BPK tersebut merupakan pihak baru yang diamankan dalam rangkaian OTT kasus Muara Enim.

"Lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi kepada wartawan, Rabu (10/6).

Menurut Budi, para ASN tersebut diduga menerima suap yang berkaitan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kali ini, lembaga antirasuah mengamankan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait temuan audit pengadaan Smart TV atau smart board di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

dengan hasil pemeriksaan BPK atas proyek pengadaan Smart TV di Kabupaten Muara Enim.

"Untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian

suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Budi.

la menambahkan, dugaan suap

tersebut berkaitan langsung dengan temuan audit yang sebelumnya telah diungkap KPK dalam konstruksi perkara korupsi di Muara Enim.

"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan salah satunya adalah Smart TV yang kemarin sudah kita jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim," lanjutnya.

Dalam keterangan terpisah, Budi mengungkapkan bahwa OTT terhadap ASN BPK dilakukan di sejumlah lokasi, baik di Jakarta maupun Sumatera Selatan. "Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan juga ya, ada yang diamankan juga baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

la menjelaskan bahwa operasi tersebut masih menjadi bagian dari pengembangan perkara yang menjerat Bupati Muara Enim.

Sumarni Jadi Plt Bupati Muara Enim, Diminta Kawal Proyek Strategis

PEMERINTAHAN Kabupaten Muara Enim dipastikan tetap berjalan di tengah proses hukum yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi menunjuk Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim.

Penyerahan surat penugasan tersebut dilakukan langsung oleh Herman Deru di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6/2026). Acara itu turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat daerah Kabupaten Muara Enim.

Penunjukan Sumarni dilakukan setelah Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Herman Deru menegaskan, secara konstitusional jabatan kepala daerah harus tetap berjalan meskipun bupati berhalangan menjalankan tugas.

"Ya, baru saja kita menyerahkan surat untuk melaksanakan tugas Bupati Muara Enim. Secara konstitusi wakil bupati yang melaksanakan tugas bupati, ketika bupati berhalangan," ujar Herman Deru.

Deru menekankan bahwa seluruh agenda pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim 2025-2029 harus tetap dilaksanakan sesuai target.

Menurutnya, salah satu proyek prioritas yang wajib dikawal adalah pembangunan empat flyover di Muara Enim yang ditargetkan mulai berfungsi pada 2027. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurangi perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api.

"Ini menjadi salah satu tugas pokok Ibu Marni. Setelah ini saya instruksikan langsung kembali ke daerah agar roda pemerintahan tidak terjadi stagnasi,"

tuturnya.

Selain memastikan keberlanjutan proyek strategis, Herman Deru juga memberikan tiga mandat utama kepada Sumarni sebagai Plt Bupati Muara Enim.

Pertama, sebagai pemimpin pemerintahan, Sumarni harus memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bekerja normal dan pelayanan publik berjalan tanpa gangguan.

Kedua, sebagai pemimpin pembangunan, seluruh program strategis daerah harus terus dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Ketiga, sebagai pemimpin masyarakat, Sumarni diminta lebih sering hadir di tengah warga dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat. (wid,ist/dya)

Barang bukti terkait kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.ist



Pemkot Malang Usul Penentuan Titik SPPG Libatkan Pemda

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan agar pemerintah daerah (Pemda) dilibatkan dalam proses penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kalau saat ini yang coba kami usulkan kepada BGN, business process dari suatu SPPG itu sejak awal melibatkan Pemda. Artinya, kami ini kan punya peta penerima manfaat, baik itu anak usia sekolah, atau 3B (Busui/Ibu menyusui, Bumil/Ibu hamil, dan Balita non PAUD)," ujar Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (10/6/2026).

Ketua Satuan tugas (Satgas) MBG Kota Malang tersebut menegaskan, pelibatan ini dinilai penting. Karena pemda memiliki data sebaran penerima manfaat serta peta tata ruang yang dapat menjadi acuan dalam menentukan lokasi SPPG.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi makanan sekaligus menjaga kualitas menu yang diterima masyarakat.

"Sehingga kami bisa merekomendasikan titik-titik SPPG yang memenuhi kesesuaian tata ruang dan yang paling dekat jangkauannya dengan penerima manfaat," katanya.

Erik menjelaskan, jarak distribusi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan. Sebab, proses memasak yang terlalu dini, waktu pengemasan yang panjang, hingga perjalanan distribusi yang terlalu jauh berpotensi menurunkan kualitas makanan.

"Tentu ada potensi makanan menjadi basi. Itu yang juga harus diantisipasi," ungkapnya.

Selain mempertimbangkan efisiensi distribusi, Pemkot Malang, sambungnya, saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap seluruh titik SPPG yang ada maupun yang direncanakan. Pemetaan tersebut bertujuan menghindari terjadinya tumpang tindih wilayah layanan.

Menurut Erik, tanpa perencanaan yang matang, bukan tidak mungkin beberapa SPPG justru melayani wilayah penerima manfaat yang sama

sehingga distribusi menjadi tidak optimal.

"Kalau saat ini masih kami petakan, kami plotting secara spasial supaya jangan sampai terjadi tumpang tindih. Misalnya antara SPPG berebut penerima manfaat. Itu yang kami rekomendasikan kepada BGN," jelasnya.

Erik pun menegaskan, koordinasi penentuan titik SPPG idealnya memang melibatkan pemerintah daerah sejak awal pelaksanaan, karena Pemkot memiliki kewenangan dan data pendukung yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan, serta kondisi wilayah.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga melakukan pembinaan terhadap 7 SPPG yang belum memenuhi



Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (10/6/2026). (Santi/Lentera)

ketentuan teknis, khususnya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada BGN agar menjatuhkan sanksi sesuai regulasi yang berlaku. (Santi/Dya)

DPRD Desak Kajian Matang soal Alun-alun Kapanjen di Stadion Kanjuruhan



Ilustrasi: Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang. (foto: Kementerian PU RI)

MALANG - DPRD Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyusun kajian yang matang sebelum merealisasikan proyek Alun-alun Kapanjen di kawasan Stadion Kanjuruhan.

"Kami tidak menghambat pembangunan. Kami mendukung pembangunan, tetapi jangan sampai mengorbankan fungsi Stadion Kanjuruhan yang sudah dibangun dan ditata sedemikian rupa," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia'ul Haq, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, penentuan lokasi

alun-alun tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan pembangunan fisik semata. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan perubahan lokasi telah dianalisis secara menyeluruh sebelum proyek dijalankan.

"Kami mendukung pembangunan Alun-alun Kapanjen. Tetapi sebelum diputuskan lokasinya, harus dikaji terlebih dahulu dan disampaikan ke masyarakat. Jangan sampai muncul persoalan baru karena belum ada kajian yang matang," katanya.

Zia menilai kajian tersebut penting karena hingga saat ini belum ada pemaparan resmi dari pihak eksekutif kepada DPRD, maupun kepada masyarakat mengenai urgensi pembangunan Alun-Alun Kapanjen di kawasan Stadion Kanjuruhan.

Menurut mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan Pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DPRD Kabupaten Malang itu, lokasi Alun-Alun Kapanjen sebenarnya telah tercantum dalam sejumlah dokumen perencanaan daerah.

"Kalau mengacu pada RTRW, RDTR Kapanjen, RPJPD, dan RPJMD, lokasi alun-alun sudah direncanakan di belakang Pendapa Kabupaten Malang, Kapanjen," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang tersebut.

Karena itu, Zia menilai perubahan lokasi pembangunan perlu disertai argumentasi yang kuat. Serta penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah disusun sebelumnya.

Selain aspek perencanaan, DPRD juga mengingatkan agar Pemkab Malang mempertimbangkan fungsi kawasan Stadion Kanjuruhan yang selama ini menjadi ikon olahraga di Kabupaten Malang. Lahan sekitar 1,5 hektare yang diwacanakan menjadi lokasi alun-alun disebut merupakan bagian dari kawasan penunjang

stadion.

Ia khawatir pembangunan ruang publik tanpa perencanaan yang matang justru dapat mengurangi fungsi kawasan stadion yang telah ditata untuk mendukung berbagai aktivitas olahraga dan kegiatan masyarakat.

Di sisi lain, Zia menegaskan keberadaan alun-alun harus mampu menjadi ruang publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, lokasi yang dipilih harus mudah diakses serta mampu menjadi pusat interaksi warga dalam kehidupan sehari-hari.

"Alun-alun harus menjadi tempat berkumpul masyarakat, ruang interaksi warga, dan benar-benar dimanfaatkan setiap hari. Jangan sampai hanya ramai saat acara seremonial saja," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemkab Malang berencana membangun Alun-Alun Kapanjen di kawasan Stadion Kanjuruhan. Lahan yang dipersiapkan masih berupa area persawahan milik masyarakat dengan estimasi kebutuhan anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp150 miliar. (Santi/Dya)

TRUMP TAK SABAR SOAL NEGOSIASI, SEBUT IRAN 'HARUS MEMBAYAR HARGANYA'

Melalui unggahan di media sosialnya pada Rabu, (10/6), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan pernyataan keras kepada Teheran. Ia menilai Iran telah menyia-nyaiakan terlalu banyak waktu di meja perundingan. Sejak perang meletus pada 28 Februari 2026, Trump telah sebanyak 38 kali mengklaim bahwa kesepakatan damai sudah di depan mata.

Iran hanya banyak bicara tanpa tindakan. Mereka telah terlalu lama menunda negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan yang sebenarnya akan sangat baik bagi mereka. Sekarang mereka harus membayar harganya!!!" tulis Trump.

Pernyataan itu disampaikan di tengah situasi yang kian memanas. Kedua negara sebelumnya telah saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah, meski upaya diplomatik dilaporkan masih terus berjalan.

Pada pagi yang sama, para negosiator Qatar bertolak ke Teheran. Seorang pejabat yang mengetahui perkembangan situasi menyebut perjalanan itu dilakukan setelah adanya konsultasi dengan pemerintah Amerika Serikat--sinyal bahwa jalur perundingan belum sepenuhnya tertutup.

Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi, baik mengenai unggahan Trump maupun misi diplomatik yang dijalankan Qatar.

Sejak perang antara Amerika Serikat



Presiden AS Donald Trump digambarkan sebagai Naruto Uzumaki dalam sebuah video musik baru-baru ini. (Truth Social @realDonaldTrump)

dan Iran meletus pada 28 Februari 2026, Presiden Donald Trump telah sebanyak 38 kali mengklaim bahwa kesepakatan damai dengan Teheran sudah di depan mata. Namun hingga kini, kesepakatan itu tak kunjung terwujud.

Semua bermula pada 23 Maret 2026, kurang dari sebulan setelah AS dan

Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran. Saat berbicara kepada wartawan di luar Air Force One, Trump menyebut pembicaraan damai berjalan menjanjikan. "Poin-poin kesepakatan utama, menurut saya hampir semua poin kesepakatan," ujarnya. Teheran membantah. Tidak ada negosiasi, kata

mereka.

Namun Trump tidak berhenti. Sehari kemudian, 24 Maret, ia mulai mengulang klaim bahwa "Iran sangat ingin mencapai kesepakatan." Pada 25 Maret, Iran ia gambarkan sebagai pihak yang sangat berhasrat berdamai. Sehari berikutnya, 26 Maret, dalam rapat kabinet, Trump menyebut Iran tengah "memohon untuk mencapai kesepakatan."

Ketika ditanya wartawan di Air Force One pada 29 Maret apakah kesepakatan akan tercapai dalam seminggu, jawabannya ringkas. "Saya melihat ada kesepakatan dengan Iran, ya," kata Trump.

Klaim demi klaim terus bergulir, sementara di lapangan situasi jauh dari kata damai. Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Timur Tengah dan wilayah Israel, sekaligus memblokir Selat Hormuz. AS kini membalas dengan memberlakukan blokade terhadap pelayaran Iran.

Konflik memang sempat memasuki masa gencatan, namun bentrokan masih terus terjadi di sana-sini.

Terbaru Trump mengizinkan gelombang serangan lanjutan terhadap Iran setelah menuduh Teheran menembak jatuh helikopter militer Apache Amerika Serikat di atas Selat Hormuz.

"Saya baru saja mendapat informasi dari militer hebat kita bahwa tadi malam Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache kami yang sangat canggih saat melakukan patroli di atas Selat Hormuz," tulis Trump di media sosial.

Dua pilot yang berada di dalam helikopter itu selamat tanpa cedera. Namun bagi Trump, hal itu tak mengubah keputusannya. "Amerika Serikat harus merespons serangan ini," tegasnya.

Beberapa jam berselang, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan serangan balasan ke Iran, menyebutnya sebagai "serangan untuk membela diri". Ledakan dilaporkan terjadi di kota pelabuhan Sirik di Iran selatan serta sejumlah lokasi lain di sekitar Selat Hormuz, dimulai sekitar pukul 17.00 waktu Pantai Timur AS. "Misi ini merupakan respons yang proporsional terhadap agresi Iran yang tidak dapat dibenarkan," kata CENTCOM. (gus,ist,afp/dya)

Helikopter serang Apache Angkatan Darat AS. Foto: CENTCOM



KETEGANGAN antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat di kawasan Teluk setelah Teheran menegaskan bahwa Selat Hormuz bukan merupakan perairan internasional sekaligus mengklaim berhasil menembak jatuh drone tempur Amerika MQ-9 serta melancarkan serangan terhadap Armada Kelima AS di Bahrain.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Selasa (9/6) menegaskan posisi negaranya terkait Selat Hormuz melalui unggahan di media sosial X yang disertai peta batas maritim kawasan tersebut.

"Selat Hormuz bukan perairan internasional, tetapi dibagi antara Iran dan Oman, dan terletak ribuan mil

Teheran: Selat Hormuz Bukan Perairan Internasional

jauhnya dari pantai Amerika Serikat. Batas maritim sangat jelas," tulis Araghchi.

Ia juga memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing di sekitar wilayah Iran akan selalu mengandung risiko keamanan.

"Angkatan bersenjata kita yang tangguh selalu siaga terhadap setiap pelanggaran wilayah udara, darat, atau perairan Iran. Pasukan asing di dekat wilayah kita selalu berisiko karena kesalahan manusia, kecelakaan biasa, atau berpotensi terjebak dalam baku tembak," ujarnya.

Menurut Araghchi, cara paling efektif untuk menghindari eskalasi adalah dengan menarik pasukan asing dari kawasan tersebut.

"Untuk mengurangi risiko, solusi terbaik adalah agar pasukan asing segera meninggalkan lingkungan yang tidak akan pernah ramah terhadap kehadiran musuh," katanya.

Meski menegaskan bahwa Iran tetap mengutamakan jalur diplomasi,

Araghchi mengingatkan bahwa militer Iran telah berulang kali menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai bentuk agresi asing dan "juga tahu bagaimana berbicara dalam bahasa lain."

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Teheran juga memperketat pengawasan di Selat Hormuz setelah Presiden AS, Donald Trump, pada 13 April lalu mengumumkan kelanjutan blokade angkatan laut terhadap kapal dan pelabuhan Iran, sebuah langkah yang dinilai Teheran bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan di Washington.

Di tengah memanasnya situasi tersebut, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Rabu (10/6) mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai dan tempur MQ-9 milik Amerika Serikat di wilayah selatan Provinsi Bushehr. (gus,ist/dya)

Catat! Kuning Telur Lebih Oranye Belum Tentu Omega-3

Warna kuning telur kerap menjadi pertimbangan konsumen saat memilih telur. Tak sedikit yang menganggap kuning telur berwarna oranye pekat menandakan telur lebih bergizi, lebih alami, atau pasti mengandung omega-3 lebih tinggi. Ada pula yang mengira telur dengan warna kuning berbeda berasal dari jenis ayam yang berbeda.

Namun berbagai penelitian menunjukkan anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Warna kuning telur dan kandungan omega-3 dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Warna lebih banyak ditentukan oleh pigmen dalam pakan ayam, sementara kadar omega-3 bergantung pada sumber lemak yang diberikan dalam ransum.

Fitri Isnia Nuryani, Sarjana Peternakan dari IPB University dengan peminatan nutrition and feed technology, menjelaskan bahwa warna kuning telur dapat bervariasi mulai dari kuning pucat hingga oranye tua. Menurut ulasan ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Animal Nutrition, warna tersebut berasal dari karotenoid, yakni pigmen alami berwarna kuning, oranye, dan merah yang terdapat pada berbagai bahan pakan.

Karotenoid memang hanya menyumbang kurang dari 1 persen lipid kuning telur, tetapi menjadi komponen utama yang menentukan warnanya. Jenis karotenoid yang paling berpengaruh adalah kelompok xantofil seperti lutein dan zeaxanthin yang banyak ditemukan dalam

m jagung, bunga marigold, paprika merah, alfalfa, dan berbagai bahan nabati lain yang digunakan sebagai pakan ayam.

Penelitian yang dimuat dalam Czech Journal of Food Sciences menunjukkan bahwa warna kuning telur sangat dipengaruhi oleh profil karotenoid dalam pakan. Namun penelitian yang sama juga menemukan bahwa warna kuning telur tidak selalu mencerminkan jumlah karotenoid yang terkandung di dalamnya.

Dalam studi tersebut, telur dengan warna paling gelap pada skala Roche, yakni nilai 13, hanya mengandung sekitar 28,3 miligram karotenoid per kilogram kuning telur. Sementara telur dari peternakan rumahan yang memiliki kandungan karotenoid jauh lebih tinggi, yakni 72,5 mg/kg, hanya memperoleh skor warna 10. Adapun telur organik dengan warna lebih pucat mengandung sekitar 20,2 mg/kg karotenoid.

Temuan itu menunjukkan bahwa warna kuning telur tidak selalu berbanding lurus dengan kandungan nutrisinya tertentu.

Peran Astaxanthin

Perbedaan warna kuning telur juga dipengaruhi oleh keberadaan astaxanthin, pigmen alami yang termasuk kelompok karotenoid.

Senyawa ini ditemukan pada

berbagai organisme laut seperti mikroalga, udang, krill, lobster, dan salmon. Dalam artikel ilmiah berjudul Astaxanthin for the Food Industry yang diterbitkan jurnal Molecules pada 2021, disebutkan bahwa astaxanthin banyak dimanfaatkan dalam industri pangan dan pakan karena kemampuannya sebagai pewarna alami sekaligus antioksidan.

Pada peternakan ayam petelur, astaxanthin dapat ditambahkan ke dalam pakan. Setelah dikonsumsi ayam, sebagian pigmen tersebut diserap tubuh dan terakumulasi pada kuning telur. Proses ini membuat warna kuning telur berubah menjadi lebih pekat, mulai dari kuning cerah hingga cenderung oranye.

Karena itu, warna kuning telur yang lebih gelap tidak selalu menandakan telur lebih segar atau lebih bergizi. Dalam banyak kasus, warna tersebut lebih mencerminkan jenis pigmen yang terdapat dalam pakan ayam.

Temuan ini sekaligus membantah anggapan yang sempat beredar di media sosial bahwa kuning telur berwarna oranye pekat merupakan ciri "telur palsu". Warna yang mencolok dapat muncul secara alami akibat kandungan pigmen tertentu dalam pakan, termasuk astaxanthin.

Pakan Kaya Lemak

Telur omega-3 pada dasarnya dihasilkan dari ayam yang diberi pakan kaya asam lemak omega-3, seperti biji rami (flaxseed), minyak ikan, atau sumber omega-3 lainnya.

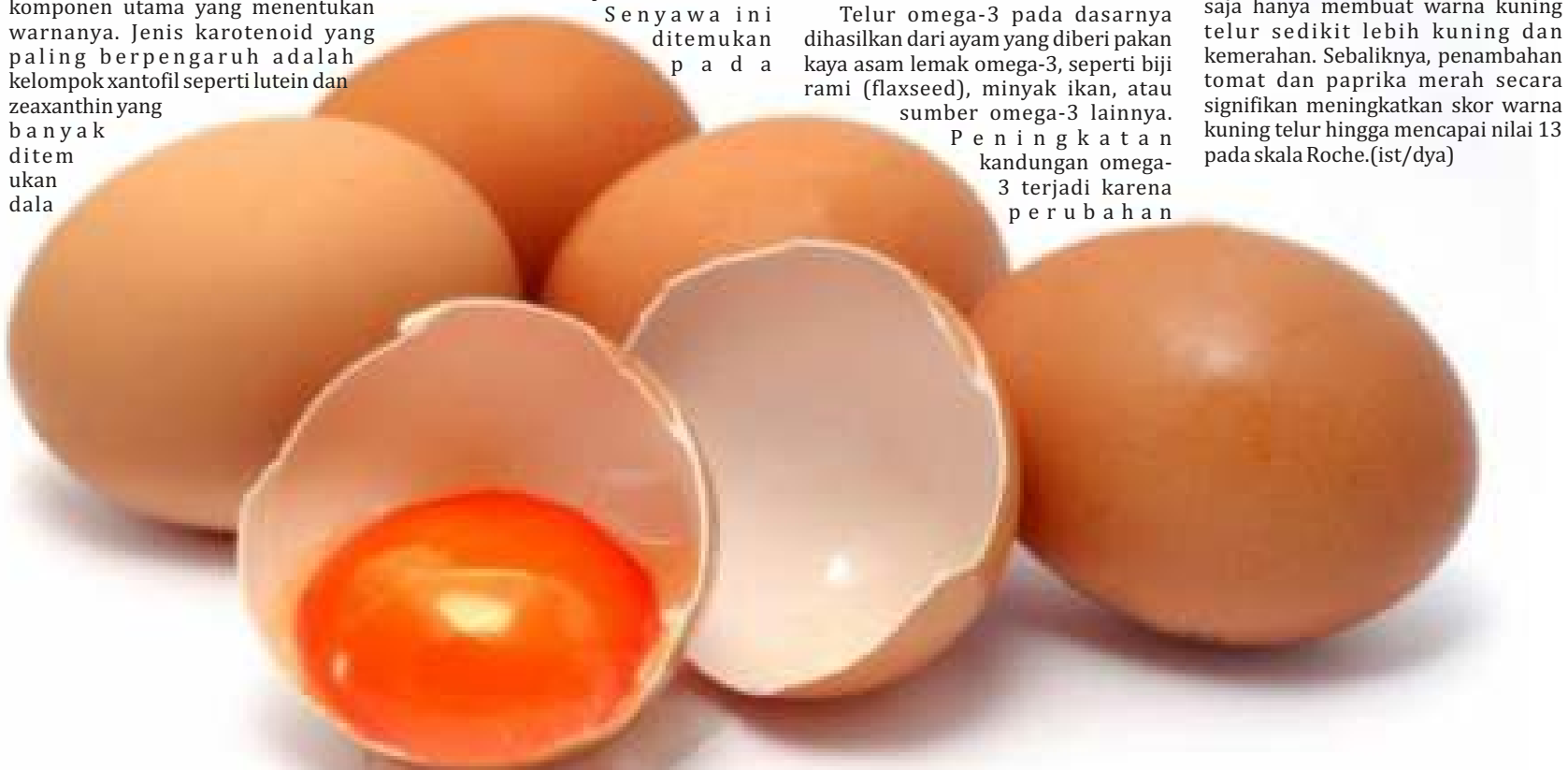
Peningkatan kandungan omega-3 terjadi karena perubahan

komposisi lemak dalam pakan, bukan akibat perubahan pigmen warna. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Foods pada 2021 meneliti pengaruh penambahan 6 persen linseed meal atau tepung biji rami sebagai sumber omega-3 pada pakan ayam petelur. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kandungan omega-3 dan perubahan warna kuning telur merupakan dua hal yang berbeda.

Dalam penelitian tersebut, kandungan asam lemak omega-3 (n-3 PUFA) pada pakan meningkat dari 2,67 persen pada pakan kontrol menjadi 7,84 hingga 10,63 persen pada pakan perlakuan. Namun warna kuning telur menjadi lebih pekat terutama ketika pakan juga ditambahkan sumber karotenoid seperti paprika merah, wortel, atau ampas seabuckthorn.

Para peneliti menyimpulkan bahwa sumber karotenoid berperan dalam meningkatkan intensitas warna kuning telur, sedangkan linseed meal berfungsi memperkaya kandungan asam lemak omega-3.

Hasil serupa ditemukan dalam penelitian lain yang menggabungkan biji rami sebagai sumber omega-3 dengan tomat dan paprika merah sebagai sumber karotenoid. Penambahan biji rami saja hanya membuat warna kuning telur sedikit lebih kuning dan kemerahan. Sebaliknya, penambahan tomat dan paprika merah secara signifikan meningkatkan skor warna kuning telur hingga mencapai nilai 13 pada skala Roche. (ist/dya)



Robot Pembantu Rumah Tangga Diuji: Bisa Memasak hingga Bersihkan Toilet



Perusahaan robotika asal Wuhan, China, Hubei Giga World Robot Co, bersiap menguji 100 robot humanoid di rumah-rumah warga sebagai bagian dari upaya membawa teknologi robot rumah tangga ke kehidupan sehari-hari. Program uji coba gratis tersebut dijadwalkan berlangsung pada kuartal ketiga 2026.

Robot yang akan diuji bernama SeeLight S1, yakni robot humanoid yang dirancang menyerupai manusia baik dari segi bentuk maupun gerakannya. Dalam video promosi perusahaan, robot tersebut diperlihatkan mampu melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, mulai dari merapikan tempat tidur, menghangatkan roti menggunakan microwave, memasak tumis tomat dan telur, menuang susu, hingga menata hidangan di meja makan.

Kemampuannya tidak berhenti di

dapur. Saat penghuni rumah beraktivitas di luar, robot itu juga dapat memasukkan pakaian ke mesin cuci, membersihkan kamar mandi dan toilet, mengelap tangannya menggunakan tisu basah, menjemur dan melipat pakaian, merapikan sofa serta meja, memberi makan ikan peliharaan, hingga menyiram tanaman.

Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Hubei Giga World Robot Co, Ye Yun, mengatakan keunggulan utama SeeLight S1 bukan terletak pada kemampuan melakukan satu pekerjaan tertentu, melainkan menyelesaikan serangkaian tugas rumah tangga yang kompleks secara mandiri.

"Kecerdasannya terletak pada kemampuan menyelesaikan pekerjaan rumah yang panjang, bertahap, dan teliti secara mandiri di lingkungan rumah nyata yang tidak

terstruktur, bukan sekadar mengulang satu tindakan secara mekanis," kata Ye seperti dikutip China Daily.

Menurut Ye, robot tersebut menggunakan teknologi physical embodied foundation model, yaitu sistem kecerdasan buatan yang belajar memahami lingkungan melalui tubuh dan sensor yang dimilikinya. Dengan teknologi itu, robot tidak hanya menjalankan instruksi secara kaku atau mengikuti jalur yang sudah ditentukan, tetapi mampu membaca kondisi sekitar, memahami situasi, lalu mengambil tindakan yang sesuai.

Ia menjelaskan, SeeLight S1 juga dapat memahami instruksi yang disampaikan menggunakan bahasa sehari-hari. Jika tata letak perabot rumah berubah, robot dapat mengenali ulang kondisi ruangan, menyesuaikan pergerakan, dan tetap menyelesaikan tugas yang diberikan.

"Robot ini juga terus belajar melalui penggunaan harian dan menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu," ujar Ye.

Minat masyarakat terhadap program ini terbilang tinggi. Berdasarkan laporan China Daily, akun resmi perusahaan di platform WeChat telah menerima lebih dari 2.000 pesan dari warga yang ingin mengikuti uji coba, meski rincian pelaksanaannya belum diumumkan secara lengkap.

Salah satu calon peserta adalah seorang pekerja yang setiap hari harus mengurus dua anak sekaligus merawat orang tua lanjut usia. Ia berharap kehadiran robot dapat

mengurangi beban pekerjaan rumah sehingga memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Ada pula pasangan berusia 75 tahun yang tinggal mandiri tanpa pendamping. Mereka berharap robot dapat membantu memasak, membersihkan rumah, mengingatkan jadwal konsumsi obat, hingga menjadi teman berbincang.

Ilmuwan utama sekaligus salah satu pendiri Hubei Giga World Robot Co, Zhu Zheng, mengatakan peserta program akan dipilih sedemikian rupa agar mewakili berbagai tipe rumah tangga yang ada di masyarakat.

Perusahaan juga akan menyediakan panduan penggunaan dan kanal umpan balik. Dengan persetujuan pengguna, data aktivitas robot selama bekerja akan dikumpulkan untuk mengevaluasi performa, mendeteksi gangguan, serta meningkatkan kualitas produk. Perusahaan menegaskan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan penyempurnaan teknologi (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Bolehkah Memakai Makeup Saat Olahraga? Catat Dampaknya

Bagi banyak perempuan, makeup sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Tak hanya saat bekerja, kuliah, atau menghadiri acara tertentu, sebagian orang juga memilih tetap menggunakan riasan ketika berolahraga agar penampilan tetap segar dan percaya diri. Namun, kebiasaan ini ternyata tidak sepenuhnya dianjurkan oleh para ahli kulit.

Dokter spesialis kulit umumnya menyarankan untuk menghindari penggunaan makeup saat berolahraga. Ketika tubuh bergerak aktif, produksi keringat meningkat dan pori-pori kulit terbuka lebih lebar. Pada kondisi tersebut, kulit menjadi lebih rentan terhadap penumpukan kotoran, minyak, dan bakteri. Jika wajah masih tertutup lapisan makeup, terutama produk complexion yang cukup tebal seperti foundation matte atau cushion dengan daya tahan tinggi, risiko penyumbatan pori-pori menjadi semakin besar.

Pori-Pori Mudah Tersumbat

Saat berolahraga, keringat yang bercampur dengan minyak alami kulit dapat berinteraksi dengan lapisan makeup di wajah. Campuran tersebut berpotensi menyumbat pori-pori, terlebih jika ditambah paparan debu dan kotoran dari lingkungan sekitar. Kondisi inilah yang sering menjadi pemicu munculnya breakout atau masalah kulit lainnya setelah berolahraga.

Produk makeup yang memiliki tekstur berat dapat membuat kulit terasa "sesak" ketika tubuh sedang aktif berkeringat. Akibatnya, proses pengeluaran keringat tidak berlangsung optimal dan pori-pori menjadi lebih mudah tersumbat.

Risiko Jerawat Meningkat

Pori-pori yang tersumbat tidak hanya menyebabkan kulit terasa tidak nyaman, tetapi juga dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ketika bakteri terperangkap di dalam pori-pori, risiko munculnya jerawat,

bruntusan, komedo putih maupun komedo hitam akan meningkat.

Selain produk makeup yang digunakan, kebersihan alat makeup juga memegang peranan penting. Sponge dan brush yang jarang dibersihkan dapat menjadi sarang bakteri yang kemudian berpindah ke kulit wajah. Tidak sedikit kasus jerawat setelah olahraga justru disebabkan oleh aplikator makeup yang kotor, bukan semata-mata karena produknya.

Memicu Iritasi dan Kemerahan

Menggunakan makeup saat berolahraga juga dapat membuat panas dan kotoran terperangkap di permukaan kulit. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan iritasi serta kemerahan, terutama pada area wajah yang sensitif.

Bagian mata menjadi salah satu area yang paling rentan mengalami gangguan. Saat tubuh mengeluarkan banyak keringat, maskara atau eyeliner yang luntur bisa masuk ke mata dan menyebabkan rasa perih, mata kering, hingga iritasi. Selain itu, kombinasi antara keringat dan sisa produk makeup juga dapat memicu munculnya milia, yakni bintik-bintik putih kecil yang sering ditemukan di area wajah.

Jika Tetap Ingin Makeup Saat Olahraga

Meski tidak direkomendasikan, sebagian orang tetap merasa lebih percaya diri menggunakan sedikit riasan saat berolahraga. Jika demikian, pilihlah produk yang ringan dan berlabel non-comedogenic agar tidak

mudah menyumbat pori-pori.

Beberapa pilihan yang relatif aman antara lain tinted sunscreen, concealer tipis pada area tertentu, brow gel untuk merapikan alis, serta lip tint dengan formula ringan. Penggunaan produk-produk tersebut dinilai lebih bersahabat bagi kulit dibandingkan foundation atau cushion yang tebal.

Untuk pelembap, penggunaannya sebenarnya tidak terlalu diperlukan sebelum berolahraga karena produk tersebut cenderung tidak terserap optimal saat kulit aktif mengeluarkan keringat.

Namun, ada pengecualian untuk sunscreen. Jika aktivitas olahraga dilakukan di luar ruangan, tabir surya tetap wajib digunakan guna melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kerusakan kulit dalam jangka panjang.

Jangan Lupa Bersihkan Wajah

Hal yang tak kalah penting adalah menghindari penggunaan terlalu banyak lapisan produk sebelum pergi ke gym atau melakukan olahraga outdoor. Produk berformula matte maupun waterproof sebaiknya dibatasi karena dapat membuat kulit semakin sulit "bernapas" ketika tubuh sedang aktif bergerak.

Setelah selesai berolahraga, jangan biarkan campuran makeup, minyak, dan keringat menempel terlalu lama di wajah. Segera bersihkan kulit menggunakan micellar water atau facial wash. Jika sebelumnya menggunakan sunscreen maupun produk complexion, metode double cleansing sangat disarankan untuk memastikan tidak ada residu yang

tertinggal.

Langkah ini dapat membantu mengurangi risiko pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, iritasi, maupun masalah kulit lainnya.

Mmemakai makeup saat olahraga memang bukan pilihan yang ideal. Namun jika tetap ingin melakukannya, pilih produk yang ringan, gunakan skincare yang tepat, dan pastikan kebersihan kulit selalu terjaga setelah beraktivitas. Dengan begitu, kulit tetap terlindungi meski tubuh aktif bergerak dan berkeringat. (ist/dya)

Jenis makeup terbaik untuk olahraga

Complexion Ringan (Base)

Tinted Sunscreen / Skin Tint: Menggantikan foundation berat dengan produk yang memberikan perlindungan UV sekaligus meratakan warna kulit secara natural.

Translucent Powder: Sapukan sedikit bedak tabur transparan hanya di area T-zone untuk mengunci minyak tanpa membuat wajah terlihat dempul (cakey).

Riasan Mata & Alis Tahan Air [10] Waterproof Mascara: Memastikan bulu mata tetap lentik tanpa risiko luntur atau membuat area bawah mata hitam saat Anda berkeringat.

Clear Brow Gel / Tinted Brow Gel: Merapikan dan mengunci posisi rambut alis agar tetap on-point tanpa takut luntur seperti pensil alis biasa. (*)

BBM Naik Dadakan...dari hal 1

Kenaikan mendadak harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali memantik perdebatan publik. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamina dan Pertamina Green 95 mulai 10 Juni 2026. Pertamina (RON 92) melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar 32 persen, sedangkan Pertamina Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di saat yang sama, Ptalite tetap dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi bertahan di level Rp6.800 per liter.

Pertamina menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme evaluasi berkala dan formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, mengatakan harga baru ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi serta distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat.

Namun, keputusan tersebut langsung menuai kritik. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai kenaikan harga dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai kepada publik. Bahkan, menurutnya, DPR yang memiliki fungsi pengawasan di sektor energi juga tidak mendapatkan informasi ataupun diajak berdiskusi sebelum kebijakan tersebut diumumkan.

"Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa penjelasan yang utuh kepada masyarakat," ujar Mufti.

Ia menegaskan bahwa BBM bukan sekadar komoditas biasa, melainkan instrumen yang memiliki dampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang, kegiatan usaha, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut harga BBM seharusnya dilakukan secara transparan, hati-hati, dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Kritik juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menilai kenaikan harga Pertamina dan Pertamina Green yang diumumkan secara mendadak menimbulkan keterkejutan di tengah masyarakat. Menurutnya, sebagai produk yang digunakan secara luas dan berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, perubahan harga semestinya disampaikan secara lebih transparan dan memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk menyesuaikan keputusan ekonominya.

YLKI mendesak pemerintah dan Pertamina membuka secara rinci

formula serta komponen pembentuk harga BBM agar masyarakat memahami alasan di balik lonjakan harga tersebut. Rio juga mengingatkan adanya potensi perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi seperti Ptalite karena selisih harga yang semakin lebar.

Menurut YLKI, kondisi tersebut perlu diantisipasi secara serius agar tidak menimbulkan lonjakan permintaan yang berujung pada antrian panjang, pembatasan distribusi, bahkan potensi kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah. Rio menegaskan, jangan sampai masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perubahan kebijakan tersebut.

Selain itu, YLKI menyoroti efek berantai yang hampir selalu mengikuti kenaikan BBM. Mulai dari meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga pengeluaran rumah tangga. Kelompok kelas menengah disebut sebagai kelompok yang paling rentan terdampak karena tidak menerima subsidi BBM, tetapi harus menanggung kenaikan biaya energi dan biaya hidup secara bersamaan.

Keluhan serupa mulai dirasakan pelaku usaha. Sektor logistik menjadi

salah satu yang paling terdampak karena biaya operasional kendaraan meningkat signifikan. CEO SiCepat Ekspres Indonesia, Barry Lim, mengakui kenaikan harga BBM memberikan tekanan tambahan pada biaya logistik nasional, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen akhir. Menurutnya, kenaikan biaya distribusi berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi melalui kenaikan ongkos kirim dan harga barang.

Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat kelas menengah dan kelas menengah atas yang selama ini tidak berhak menikmati BBM bersubsidi, tetapi juga tidak cukup mapan untuk menanggung lonjakan biaya energi secara mudah. Menurutnya, kelompok ini berada dalam posisi rentan karena pendapatannya tidak cukup rendah untuk memperoleh subsidi, namun juga tidak cukup tinggi untuk mengabaikan kenaikan harga BBM.

Andri memperkirakan kenaikan harga Pertamina akan mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi dengan beralih dari produk nonsubsidi ke produk subsidi. Jika perpindahan tersebut terjadi secara masif dan berlangsung dalam waktu lama, permintaan BBM subsidi

berpotensi meningkat tajam dan memicu gangguan pasokan hingga kelangkaan di lapangan. (wid,ist,rla,ini/dya)

KENAIKAN BBM DI INDONESIA

Era Prabowo (2024-sekarang)

- Ptalite tetap Rp10.000/liter
- Solar subsidi tetap Rp6.800/liter
- Inflasi terkendali 1,5-3%
- BBM subsidi belum mengalami kenaikan
- Kenaikan Terbaru (10 Juni 2026)
- Pertamina naik 32% menjadi Rp16.250/liter
- Pertamina Green naik 31,8% menjadi Rp17.000/liter
- Dipicu kenaikan harga minyak dunia dan tensi Timur Tengah

Era Jokowi (2014-2024)

- Premium 2014: Rp8.500/liter
- Ptalite naik Rp7.650 → Rp10.000 (2022)
- Solar subsidi naik jadi Rp6.800
- Subsidi dialihkan ke infrastruktur dan bansos

Era SBY (2004-2014)

- Premium: Rp1.810 → Rp6.500/liter
- Kenaikan terbesar terjadi 2005
- Harga minyak dunia sempat tembus US\$140/barel
- BLT diberikan sebagai kompensasi

Era Megawati (2001-2004)

- Premium: Rp1.550 → Rp1.810/liter
- Inflasi 5-11%
- Reformasi subsidi energi berlanjut

Era Gus Dur (1999-2000)

- Premium: Rp600 → Rp1.450/liter
- Inflasi 9-12%
- Pertamina mulai diperkenalkan

Era Habibie (1998-1999)

- BBM turun Rp1.200 → Rp1.000/liter
- Inflasi turun menjadi 2%
- Harga minyak dunia hanya US\$14-15/barel

Era Soeharto (1967-1998)

- Premium: Rp150 (1980) → Rp1.200 (1998)
- Inflasi rata-rata 8-12%
- Krisis 1998 dorong kenaikan BBM

Era Soekarno (1945-1967)

- BBM: Rp0,30 → Rp1 → Rp0,50/liter
- Inflasi 1965: 300%
- Inflasi 1966: 650% (hiperinflasi)
- Redenominasi rupiah 1965 (Rp1.000 jadi Rp1)

Purbaya: Tak Banyak Pengaruhi Inflasi



Warga antrre BBM Subsidi usai nonsubsidi naik harga. (Ilustrasi/dok)

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina dan Pertamina Green tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, pengaruh kenaikan harga kedua produk tersebut relatif terbatas karena bukan menjadi bahan bakar utama yang digunakan sektor angkutan umum maupun distribusi barang.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamina enggak dipakai angkutan barang," kata

Purbaya di Kompleks Parlemen RI, Rabu (10/6).

Menurut Purbaya, sektor transportasi barang dan angkutan umum yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan harga barang dan jasa tidak bergantung pada Pertamina. Karena itu, dampak kenaikan harga

BBM nonsubsidi terhadap inflasi nasional diperkirakan tetap terbatas.

"Harusnya limited karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai (Pertamax)," ujarnya.

Saat ditanya mengenai langkah pemerintah untuk mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi akibat kenaikan harga Pertamina yang cukup tajam, Purbaya menyerahkan hal tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya,

mekanisme pengendalian distribusi dan kuota BBM subsidi telah menjadi ranah Kementerian ESDM.

"Itu nanya ke Pak Bahlil, mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau salah, nanya Pak Bahlil yang ngerti," katanya. Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Kebijakan tersebut disebut sebagai arahan langsung Presiden untuk menjaga daya beli masyarakat. (wid,ist/dya)



Reses DPRD Surabaya, Laporan Infrastruktur dan Lapangan Kerja Mendominasi ARIF FATHONI: ASPIRASI WARGA HARUS JADI PRIORITAS

SURABAYA-Persoalan infrastruktur lingkungan dan kebutuhan lapangan kerja menjadi dua aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dalam pelaksanaan reses DPRD Kota Surabaya. Hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan 50 anggota dewan di seluruh daerah pemilihan menunjukkan bahwa masyarakat masih menginginkan percepatan pembangunan fasilitas dasar sekaligus terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan seluruh masukan masyarakat tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program pembangunan daerah. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda rutin anggota dewan, melainkan instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berangkat dari kebutuhan warga dan menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Fathoni menegaskan, setiap kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu, pelaksanaan reses tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial, melainkan mekanisme resmi yang menjadi salah satu dasar penyusunan program pembangunan daerah.

“Setiap kegiatan yang menggunakan APBD harus dijalankan secara akuntabel. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung menemui masyarakat, mendengar kebutuhan mereka, lalu memperjuangkannya dalam proses pembangunan daerah,” ujar Fathoni, dikutip Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, seluruh 50 anggota DPRD Kota Surabaya telah menyelesaikan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Dari berbagai pertemuan tersebut, DPRD memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan warga di berbagai wilayah Kota Pahlawan.

Hasilnya menunjukkan bahwa



persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi kebutuhan paling dominan yang disampaikan masyarakat.

Berbagai usulan mulai dari perbaikan jalan kampung, pavingisasi, pembangunan dan normalisasi saluran drainase, hingga penambahan penerangan jalan umum terus muncul dalam forum-forum reses.

Menurut Fathoni, kebutuhan infrastruktur lingkungan merupakan persoalan mendasar yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat sehari-hari. Karena itu, berbagai usulan tersebut akan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

“Keluhan yang paling dominan hampir di seluruh daerah pemilihan adalah pembangunan infrastruktur lingkungan. Termasuk berbagai kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” katanya.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian besar masyarakat. Aspirasi terkait pemerataan akses pendidikan, pembangunan sekolah negeri baru, hingga penambahan fasilitas pendidikan masih banyak

disampaikan warga.

Fathoni menilai, kehadiran sekolah negeri yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan yang relatif jauh dari sekolah negeri yang sudah ada. Oleh sebab itu, DPRD terus mendorong pembangunan sekolah baru di sejumlah wilayah yang membutuhkan.

Ia mencontohkan pembangunan beberapa SMP Negeri maupun SD Negeri yang saat ini masuk dalam agenda pembangunan Pemerintah Kota Surabaya berawal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum reses.

“Dorongan pembangunan SMP Negeri maupun SD Negeri di wilayah yang jauh dari zonasi sekolah merupakan salah satu contoh aspirasi warga yang kemudian diperjuangkan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Seluruh usulan yang diperoleh selama masa reses selanjutnya dihimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dokumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Fathoni mengakui masih ada sebagian masyarakat yang memiliki persepsi keliru mengenai Pokir DPRD. Tidak sedikit yang menganggap Pokir sebagai jatah proyek atau anggaran pribadi anggota dewan.

Padahal, kata dia, Pokir merupakan kumpulan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan DPRD agar dapat masuk ke dalam rencana pembangunan pemerintah daerah.

“Pokir bukan plafon anggaran anggota DPRD dan bukan pula proyek milik anggota dewan. Itu adalah suara masyarakat yang kami perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Setelah melalui proses verifikasi dalam SIPD, berbagai usulan tersebut akan dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas, kebutuhan pendanaan, serta waktu pelaksanaannya dalam APBD.

Fathoni menambahkan, hasil reses tidak hanya menjadi bahan penyusunan program pembangunan. Aspirasi masyarakat juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD lainnya, mulai dari fungsi pengawasan, penganggaran hingga pembentukan peraturan daerah.

Bahkan, sejumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD lahir dari berbagai persoalan yang ditemukan langsung oleh anggota dewan ketika berinteraksi dengan masyarakat di lapangan.

Karena itu, ia berharap masyarakat terus memanfaatkan forum reses sebagai ruang menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Menurutnya, semakin aktif partisipasi masyarakat, semakin tepat pula arah pembangunan yang dapat dirancang pemerintah daerah bersama DPRD.

“Reses adalah jembatan antara masyarakat dan kebijakan. Dari sanalah kami mengetahui kebutuhan warga, memahami persoalan yang mereka hadapi, lalu memperjuangkannya agar menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya,” pungkasnya. (adv/ama/dya)